

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang

Fahmi Medias^{1*}, Nasitotul Janah², Eko Kurniasih Pratiwi³
^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang
*Email: fahmimedias@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
Pemberdayaan;
UMKM; BMT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui BMT (Baitul Maal wa Tamwiil). Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan peta yang tepat tentang sejauh mana program serta kegiatan yang sudah dilakukan BMT dalam upaya meningkatkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Magelang, dengan indikator: profil BMT dan UMKM; akses program yang dimiliki UMKM terhadap program BMT; faktor-faktor yang mempengaruhi; dan analisis program yang telah dilakukan BMT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, termasuk FGD, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Adapun subyek penelitian adalah BMT yang melakukan operasional di kabupaten magelang dan UMKM yang dibina melalui pembiayaan dan permodalan BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Magelang sebagian besar terbatas pada pemberian pembiayaan dengan karakter sama dengan jenis pembiayaan non UMKM dan mengikutsertakan UMKM yang bermitra dengan BMT untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, baik level Kabupaten maupun Propinsi.

1. PENDAHULUAN

Sektor mikro memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, hal ini ditunjukkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap PDB (produk domestik bruto), ekspor nonmigas, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti. UMKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sektor ini juga dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam

mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 3.668.873 unit usaha, 8,8 juta pekerja, serta memiliki nilai output produksi sebesar 570 juta rupiah.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Magelang yang secara jumlah dan nilai produksi cukup bisa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi maksimalisasi tersebut bisa dilakukan dengan konsep

mengedepankan pemberdayaan ekonomi umat di bidang UMKM. Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha kecil yang tangguh. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pemberdayaan UMKM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya [14].

Namun demikian berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat income gathering, usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Masalah lain yang kemudian muncul ibarat efek domino seperti keterbatasan modal kerja, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi [13], yang secara umum berimplikasi terhadap prospek usaha yang kurang jelas.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kehadiran lembaga keuangan mikro, dalam hal ini mikro syariah, menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro syariah

lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Untuk itulah sangat penting untuk menegaskan kembali posisi dan peran lembaga keuangan mikro syariah (dalam hal ini BMT) di Kabupaten Magelang. Dengan penegasan peran BMT diharapkan UMKM di Kabupaten Magelang bisa berkembang lebih maksimal sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya tulisan ini akan memaparkan implementasi program pemberdayaan ekonomi di BMT wilayah Kabupaten Magelang yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang serta dampak program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BMT terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang.

2. METODE

2.1. Rancangan Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, dilakukan pembuatan instrumen penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) bersama obyek penelitian. Pada tahap kedua, dilaksanakan FGD bersama perwakilan dari obyek penelitian untuk mengetahui profil kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT. Pada tahap akhir, dilakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMT.

2.2. Jenis Penelitian

Model penelitian yang dilaksanakan adalah jenis kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atas informasi data-data yang bersifat bukan angka. Angka-angka yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada BMT dan UMKM yang sifatnya mendukung penjelasan data deskripsi tersebut dan kemudian di analisa untuk mengetahui hubungan diantara data yang diperoleh.

2.3. Obyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Magelang, dengan obyek penelitiannya adalah BMT SAUDARA, BMT KHARISMA, BMT ERA, BMT LE SYARIAH, BTM AMMAN, BMT AL-KHUSNA, BMT ARMA, serta UMKM yang menjadi anggota dari setiap BMT

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah:

- 1) Observasi, digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sarana dan prasarana fisik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan program dan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wa Tamwil.
- 2) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang dokumen program-program pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wa Tamwil beserta pengembangannya. Termasuk didalamnya adalah perencanaan, proses, hasil kegiatan sampai pada evaluasi program pemberdayaan UMKM. Foto-foto pendukung juga digunakan untuk dikaji lebih lanjut.
- 3) Wawancara/*Interview*, digunakan untuk mengumpulkan data kepada subyek

penelitian maupun informan terkait dengan profil kegiatan, akses kegiatan dan kontrol atas sumber daya dan keuntungan yang diperoleh, faktor-faktor yang mempengaruhi dan analisis siklus program kegiatan pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wa Tamwil

- 4) Forum Group Discussion, digunakan untuk mengumpulkan data penilaian kualitatif atas program yang telah dilaksanakan oleh BMT yang ditujukan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM.. FGD ini melibatkan BMT dan UMKM dalam satu forum

2.5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul (data collection) dengan baik kemudian diedit dan dipilah. Data kualitatif yang dikumpulkan dengan FGD, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Model analisis data interaktif memungkinkan dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan. Setelah semua dilakukan analisis secara deskriptif. Bahwa penelitian kualitatif memungkinkan dilakukannya analisis pada waktu penelitian di lapangan (within site, in the field) maupun sesudah dari lapangan baru dilakukan analisis.

Selanjutnya dibuat reduksi data yang didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk menjelaskan profil kegiatan, akses kegiatan dan kontrol atas sumber daya dan keuntungan yang diperoleh, faktor-faktor yang mempengaruhi dan analisis siklus program kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT di Kabupaten Magelang.

Reduksi data dalam penelitian ini pada hakekatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut dalam dimensi dampak pemberdayaan BMT terhadap UMKM di Kabupaten

Magelang. Hasil dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk display data. Untuk penyajian data menggunakan uraian naratif. Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dan atau verifikasi. Dalam model tersebut dipandang ada hubungan interaktif antara komponen-komponen utama dalam analisis tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profit Pemberdayaan UMKM oleh BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta memiliki peran penting dalam mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat binaan (anggota). Di lain sisi, BMT juga sebagai lembaga perantara dari anggota yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dengan anggota yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan.

Pada dasarnya, BMT merupakan lembaga yang bersifat profit oriented (berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan), pada sebagian BMT menjalankan operasionalnya pada sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi lembaga. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan institusi terkecil yang sering berhubungan langsung dengan sektor lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah BMT.

Pemberdayaan yang didalamnya termasuk pendampingan usaha merupakan sebuah kegiatan yang terkadang sulit dijalankan oleh BMT, apalagi jika didasarkan pada PBMT Nasional, BMT harus dijalankan dengan target

meningkatkan omset dan aset jika ingin mendapatkan izin dan sertifikat. Sampai saat ini, pada sebagian BMT, pemberdayaan yang dilakukan terbatas pada penyediaan modal usaha, dimana pengajuan tersebut berdasar pada pengklasifikasian UMKM yang telah dilakukan oleh BMT. Dengan arti, tidak semua UMKM mendapatkan penyaluran modal dalam rangka pengembangan usaha mereka.

Pada sebagian lainnya, sudah mulai menyelenggarakan pemberdayaan secara mendalam terhadap sektor usaha kecil. Pemberdayaan dilakukan selain dengan penyertaan modal juga dengan pemberdayaan melalui pendampingan usaha dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga lainnya seperti dinas koperasi terkait permasalahan yang dihadapi UMKM khususnya dalam hal tata kelola keuangan, pemasaran produk usaha, ataupun pengembangan lainnya. Dengan memaksimalkan peran baitul maal yang dimiliki oleh BMT, dana zakat infaq dan sadaqah yang berhasil dihimpun oleh BMT disalurkan kembali melalui akan Qardhul Hasan kepada pihak yang membutuhkan, dalam hal ini adalah usaha kecil dan menengah.

Akad Qardhul Hasan merupakan akad yang paling mendekati prinsip pemberdayaan dalam ekonomi Islam, dimana pihak yang menerimanya hanya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tanggungjawab pembiayaannya tanpa ada keharusan untuk menyisipkan keuntungan dalam pembiayaan yang diajukan.

UMKM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan merupakan usaha yang sudah dijalankan dengan profesional, baik dari segi manajemen ataupun dari sisi tata kelola keuangan mereka. Penyaluran modal usaha kepada usaha kecil menggunakan akad musyarakah (kerjasama modal usaha) dengan kesepakatan pembagian hasil usaha antara pelaku usaha dengan lembaga

keuangan, atau menggunakan akad murabahah yang memudahkan BMT dalam pengawasan dan penyelesaian permasalahan pembiayaan yang macet.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan UMKM

Pada konsisi yang ideal, seharusnya BMT memegang peran penting dalam memberdayakan UMKM, dikarenakan BMT merupakan lembaga yang paling mudah untuk melakukan kegiatan dengan UMKM. Akan tetapi jika dilihat dari temuan penelitian diatas, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT sebatas penyediaan modal usaha semata, maka dianggap perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya peran dan fungsi BMT dalam pemberdayaan sektor UMKM, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) BMT merupakan lembaga yang bersifat profit oriented, dimana asset merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam menjalankan operasional BMT.
- 2) BMT memiliki tanggungjawab dalam penyediaan dan pembagian hasil usaha kepada anggota yang mempercayai dananya untuk disimpan pada lembaga keuangan, atas dasar tersebut, maka setiap kegiatan BMT haruslah menghasilkan keuntungan.
- 3) Pengelola yang kurang mencukupi jumlahnya juga merupakan salah satu faktor penyebab kurang mampunya BMT dalam menjalankan peran pemberdayaan terhadap UMKM.
- 4) Kerjasama dengan pihak lain yang dirasa kurang maksimal antara BMT dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan.
- 5) Dari sisi UMKM, pendampingan yang dilaksanakan kurang maksimal

disebabkan Moral Hazard dan Culture pelaku UMKM yang menyebabkan kurang transparansi dan terbukanya UMKM dalam melaporkan keuntungan usaha jika menggunakan akad musyarakah.

- 6) Agunan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan, maksudnya adalah sebagian besar UMKM yang mengajukan kerjasama tidak memiliki jaminan bahwa kerjasama yang dilaksanakan akan berjalan lancar, hal ini yang banyak menyebabkan terjadinya Wanprestasi dari pelaku UMKM terhadap kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan melalui penyediaan modal usaha dengan menggunakan akad musyarakah, murabahah, wakalah, dan qardhul hasan. Selain itu, BMT juga membantu memasarkan produk usaha anggota berkerjasama dengan lembaga dan instansi (Dinas Koperasi) dalam bentuk kolaborasi kegiatan pemberdayaan UMKM.
- b. Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan BMT diantaranya adalah terbantunya usaha UMKM anggota dalam pengembangan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan modal usaha yang berimplikasi pada peningkatan keuntungan usaha UMKM.

REFERENSI

- [1] Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta

- [2] Budhi Wibhawa, Santoso T. Raharjo, & Meilany Budiarti S. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran
- [3] Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Time Series Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2014*.
- [4] Irsan Azhari, *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, (Jakarta, LPES, 1991), cet.ke-2.
- [5] Kaplan, Robert S., & Norton, David P., (1996), *Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard*, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
- [6] Kaplan, Robert S., & Norton, David P., (2001), *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*, Boston, Massachusetts: Harvard Business Publishing Corporation.
- [7] Kaplan, Robert S., & Norton, David P., (2006), *Alignment: using Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies*. Boston, Massachusetts: Harvard Business Publishing School Press.
- [8] Mamik Sunarti. 2006. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- [9] Karsidi, R & Irianto, H. 2005. *Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta*. Dalam *Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah*. Hotel Sahid Raya Solo, 30 Juni 2005.
- [10] Masyita, Dian, 2005, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Laporan Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta
- [11] M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, diterj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- [12] Nair, Mohan, (2004), *Essentials of Balanced Scorecard*, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
- [13] Niven, Paul R., (2002), *Balanced Scorecard Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- [14] Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha* (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), cet.ke-1.
- [15] Qahaf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- [16] Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cetakan kedua. Yogyakarta: UII Press
- [17] Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- [18] Rozalinda, 2013, *Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, Kamis, 30 Mei 2013, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*
- [19] Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- [20] Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*. *International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1*
- [21] Supardi. 2005. *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm)

100 of 100

ISSUES FOUND IN THIS TEXT

0

PLAGIARISM

11%